

**DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA KE VANUATU DALAM
PENURUNAN TENDENSI SEPARATISME DI PAPUA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

**MUHAMAD TEZAR BILYAM
07041281621089**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA KE VANUATU DALAM
PENURUNAN TENDENSI SEPARATISME DI PAPUA**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

MUHAMAD TEZAR BILYAM

07041281621089

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 16 Juni 2021

Pembimbing I

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.

NIP. 197905012002121005

Pembimbing II

Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA.

NIP. 199104092018032001

Disetujui oleh,

Ketua Jurusan,

Dr. Azhar, SH., M.Sc., LLM.

NIP. 196504271989031003

HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI
DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA KE VANUATU DALAM PENURUNAN
TENDENSI SEPARATISME DI PAPUA
SKRIPSI

Telah memperbaiki skripsi sesuai dengan petunjuk dari Tim Penguji dalam Sidang Ujian Skripsi sebagaimana tertulis dalam "Hasil Ujian Skripsi" pada 2 Agustus 2021

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
Ketua

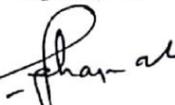
Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA
Anggota

Ferdiansyah Rivai, S.IP., MA
Anggota

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
Anggota



Indralaya, 24 November 2021
Mengetahui,
Ketua Program Studi


Dr. Azhar SIL, M.Sc., LL.M., LL.D
NIP. 1965042719893100

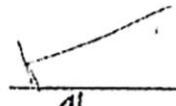
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA KE VANUATU DALAM PENURUNAN
TENDENSI SEPARATISME DI PAPUA

SKRIPSI

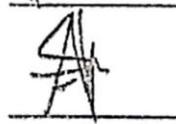
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
pada 2 Agustus 2021
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Andries Leonard, S.IP., M.SI
Ketua



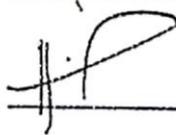
Sari Mutiara Atsyah, S.IP., MA
Anggota



Ferdiansyah Hidayat, S.IP., MA
Anggota



Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
Anggota



LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Tezar Bilyam

NIM : 07041281621089

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“Diplomasi Publik Indonesia Ke Vanuatu Dalam Penurunan Tendensi Separatisme Di Papua”** ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 2 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Muhamad Tezar Bilyam

NIM 07041281621089

INTISARI

Vanuatu menjadi salah satu negara yang vokal dalam menyatakan dukungannya dan melayangkan tuduhan-tuduhan kepada Indonesia terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Akibatnya, negara-negara lain ikut menyuarakan terkait dengan isu pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Hal tersebut tentunya dapat merugikan negara Indonesia apabila mau melakukan kerja sama dengan negara-negara Pasifik dikarenakan citra negara yang dipandang buruk di mata internasional. Penelitian ini mengkaji upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia kepada Vanuatu dalam menurunkan tendensi separatisme di Papua. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, di mana lebih memfokuskan dalam pengumpulan data melalui literasi seperti jurnal, buku, *annual report*, artikel, media tertulis, *website*, dan dokumen resmi. Teori yang digunakan adalah diplomasi publik dengan tiga indikator, yaitu *daily communication*, *strategic communication*, dan *development of lasting relationship*. Hasil dari penelitian ini adalah Indonesia telah melakukan beberapa upaya diplomasi publik terhadap Vanuatu dalam menurunkan tendensinya terkait isu separatisme di Papua, di antaranya; publikasi kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia melalui situs resmi pemerintah Vanuatu, penyelenggaraan kegiatan bertemakan Melanesia, dan melakukan pelatihan teknis dengan Vanuatu. Namun, upaya diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia dinilai masih belum berhasil, dikarenakan Vanuatu masih mengungkit kembali persoalan Papua pada Sidang PBB 2020.

Kata Kunci: Vanuatu, Separatisme, Papua, Melanesia, Organisasi Papua Merdeka, *Melanesian Spearhead Group*.

ABSTRACT

Vanuatu is one of the countries that has been vocal in expressing its support and making accusations against Indonesia regarding human rights violations that occurred in Papua. As a result, other countries voiced their voice regarding the issue of human rights violations that occurred in Papua. This of course can be detrimental to the Indonesian state if it wants to cooperate with Pacific countries because the country's image is seen as bad in the international eyes. This study examines the public diplomacy efforts carried out by Indonesia to Vanuatu in reducing the tendency of separatism in Papua. The data sources used in this study are secondary data sources, which focus more on collecting data through literacy such as journals, books, annual reports, articles, written media, websites, and official documents. The theory used is public diplomacy with three indicators, namely daily communication, strategic communication, and development of lasting relationship. The result of this research is that Indonesia has made several public diplomacy efforts towards Vanuatu in reducing its tendencies related to the issue of separatism in Papua, including; publication of Indonesian government policies through the official Vanuatu government website, organizing Melanesian-themed activities, and conducting technical training with Vanuatu. However, Indonesia's public diplomacy efforts are still considered unsuccessful, because Vanuatu is still bringing up the Papua issue again at the 2020 UN Session.

Keywords: Vanuatu, Separatism, Papua, Melanesian, Free Papua Organization, Melanesian Spearhead Group.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Diplomasi Publik Indonesia ke Vanuatu dalam Penurunan Tendensi Separatisme di Papua”. Proposal skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mencapai derajat Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Ta'ala atas segala berkah dan kemudahan yang diberikan
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E. selaku Rektor Universitas Sriwijaya
3. Bapak Prof. Dr. Ki. M. Sobri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajaran staff Dekanat lainnya
4. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing utama saya yang telah memberikan arahan, saran dan masukkan dalam penyusunan proposal skripsi ini
6. Ibu Sari Mutiara Aisyah, S.IP., MA. selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing serta memberikan arahan, saran dan masukkan dalam penyusunan proposal skripsi ini
7. Bapak Abdul Halim, S.IP., MA. sebagai dosen saya yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membimbing serta memberikan arahan, saran dan masukkan dalam penyusunan proposal skripsi ini

8. Ibu dan keluarga saya yang telah memberikan doa dan dukungan terhadap saya untuk terus berjuang dalam menyelesaikan skripsi
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya atas segala ilmu dan dedikasinya selama perkuliahan dan para Staff Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu segala keperluan administrasi selama masa perkuliahan maupun dalam penyelesaian skripsi
10. Keluarga Ade Trisendy Mepa yang telah membantu dan memfasilitasi saya dalam proses penyelesaian skripsi
11. Teman-teman dan Saudara-saudaraku yang berharga yang selalu membantu, mendukung dan memotivasi agar terus berusaha, berjuang dan menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah Ta'ala senantiasa membalas budi baik kalian dan memberikan berkah kepada kita semua, Aamiin.

Indralaya, 16 Februari 2021

Muhamad Tezar Bilyam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
INTISARI	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis	7
1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka	8
1.6. Landasan Teori	15
1.6.1. Diplomasi Publik.....	15
1.6.2. Alur Pemikiran	21
1.7. Argumen Utama	21
1.8. Metode Penelitian.....	22
1.8.1. Desain Penelitian.....	22
1.8.2. Definisi Konsep.....	23
1.8.3. Fokus dan Jangkauan Penelitian.....	23

a. Fokus Penelitian	23
b. Jangkauan Penelitian.....	24
1.8.4. Unit Analisis.....	24
1.8.5. Jenis dan Sumber Data	25
a. Jenis Data	25
b. Sumber Data.....	25
1.8.6. Teknik Pengumpulan Data	25
1.8.7. Teknik Keabsahan Data.....	25
1.8.8. Teknik Analisis Data	26
BAB II GAMBARAN UMUM.....	
2.1. Sejarah dan Identitas Papua.....	29
2.2. Sejarah Separatisme Papua di Indonesia	34
2.3. Dinamika Hubungan Indonesia dan Vanuatu Dalam Isu Separatisme Papua..	47
BAB III DIPLOMASI PUBLIK INDONESIA KE VANUATU DALAM PENURUNAN TENDENSI SEPARATISME DI PAPUA	
3.1. <i>Daily Communication</i> Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Vanuatu melalui Publikasi Situs Resmi Pemerintah Lokal	59
3.2. <i>Strategic Communication</i> melalui Penyelenggaraan Aktivitas dan Kegiatan yang Bertemakan Melanesia	61
3.3. Kerjasama yang Terjalin Antara Indonesia dan Vanuatu Sebagai Bentuk dari <i>Development of Lasting Relationship</i>	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
4.1. Kesimpulan.....	72
4.2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Sidang Internasional Klaim Vanuatu Kepada Indonesia.....	5
Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 1.3. Fokus Penelitian	23

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Teknik Analisis Data Kualitatif	27
Gambar 3.1. Festival Budaya Melanesia	63
Gambar 3.2. Negara-Negara Anggota Melanesia sedang Mengikuti Pelatihan	68
Gambar 3.3. Momen Penerimaan Beasiswa	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Separatisme menjadi salah satu ancaman utama bagi Indonesia, khususnya apabila menyangkut permasalahan mengenai kedaulatan wilayah. Pemisahan diri dari negara berdaulat (*secession*), pembentukan wilayah tersendiri (*fragmentation*), dan penentuan nasib sendiri (*self determination*) adalah konsep-konsep yang menjadi cakupan dalam isu separatisme (McHenry, 2009). Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia harus menghadapi sejumlah gerakan separatis yang terjadi di beberapa wilayah. Gerakan-gerakan separatis tersebut memakan jumlah korban yang tidak sedikit (Wahyono, 2019). Selain itu, gerakan separatisme tersebut menyisakan luka yang mendalam bagi para korban. Terdapat beberapa gerakan separatisme yang pernah terjadi di Indonesia, diantaranya; PKI Madiun, Pemberontakan DI/TII, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), Pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM) (Wahyono, 2019).

Isu separatisme Papua merupakan salah satu persoalan serius yang dihadapi Indonesia, dikarenakan sampai sekarang gerakan separatis yang terjadi di Papua masih belum terselesaikan. Dalam sejarah separatisme di Indonesia, konflik dengan OPM merupakan konflik terbesar yang pernah dihadapi oleh Indonesia (Puspitasari, 2010). Pergerakan OPM yang sebelumnya terpecah-pecah dalam berbagai faksi perlawanan, kini semakin solid, terkonsolidasi, dan rapi (Tebay, 2016). Kondisi ini pun kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia dalam meredam gerakan separatis Papua yang dapat mengancam keutuhan dari NKRI (Sabir, 2018).

Gerakan separatis yang terjadi di Papua menjadi salah satu isu yang mendapatkan perhatian khusus pemerintah Indonesia. Gerakan ini menghendaki pemisahan wilayah Papua yang saat ini terbagi menjadi dua provinsi, yaitu; Papua dan Papua Barat. Penyebab berkembangnya gerakan separatis di Papua diakibatkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah pusat dalam menangani berbagai macam permasalahan di sana. Permasalahan-permasalahan tersebut teridentifikasi dalam laporan hasil kunjungan Komisi I DPR RI dengan berbagai pemangku kepentingan pada tahun 2012 di Papua, antara lain; 1) Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah pusat dan daerah; 2) Menguatnya isu politik dan historis tentang proses integrasi Papua; 3) Tidak efektifnya Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) dalam akselerasi pembangunan; 4) Lumpuhnya pemerintah provinsi akibat kisruh pilkada dan lemahnya kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota; 5) Meluasnya aksi kekerasan bersenjata di Papua (Review, 2012).

Wilayah Papua secara resmi bergabung dengan Indonesia sejak disepakatinya Perjanjian New York (*New York Agreement*) pada tanggal 15 Agustus 1962, diikuti dengan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969 yang hasilnya disahkan dalam sidang umum PBB pada tanggal 19 November 1969. Walaupun demikian, perlawanan dari kelompok separatis di Papua terus terjadi hingga saat ini (Sabir, 2018). Kelompok separatis tersebut menilai bahwa Perjanjian New York dan Pepera 1969 sebagai “cacat hukum” dan melanggar hak-hak asasi rakyat Papua dikarenakan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, yaitu *one man one vote*, melainkan melalui sistem perwakilan (Didit Susiyanto, 2016). Dalam perkembangannya, kelompok separatis Papua yang sebelumnya bergerak secara sporadis dan tidak terkoordinasi, menjadi semakin solid dan terkonsolidasi dalam mencapai tujuannya, yaitu melepaskan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri dengan nama Papua Barat (*West Papua*).

Perlawanan dari kelompok separatis Papua yang semakin terkonsolidasi tersebut ditunjukkan melalui pembentukan *United Liberation Movement for West Papua* (ULMWP) yang menyatukan faksi-faksi perjuangan OPM antara kelompok bersenjata dan faksi politik. Kehadiran ULMWP dimaksudkan agar upaya kemerdekaan Papua lebih terkoordinasi untuk meraih dukungan politik dari masyarakat internasional (ULMWP, 2020). ULMWP dideklarasikan pada tanggal 7 Desember 2014 di Port Vila, Republik Vanuatu, dan memiliki tugas utama untuk mengampanyekan Papua Merdeka (*free West Papua Campaign*), serta melakukan lobi-lobi politik untuk mendapatkan dukungan dari berbagai negara, terutama di kawasan Pasifik Selatan (Sabir, 2018).

Vanuatu menjadi negara yang paling vokal dan tegas dalam menyatakan dukungannya terhadap Gerakan Papua Merdeka (Kemenlu, 1995). Dengan dalih persamaan ras (*Melanesian Brotherhood*), Vanuatu memfasilitasi terbentuknya ULMWP dan menggalang dukungan dari negara Pasifik lainnya untuk kampanye politik Papua Merdeka dengan memanfaatkan organisasi sub-regional di kawasan Pasifik, seperti *Melanesian Spearhead Group* (MSG). Vanuatu sendiri merupakan salah satu penggagas berdirinya MSG (Utomo, 2020).

Kepentingan Vanuatu di Papua secara antropologis didasari oleh hubungan etnis yang cukup erat, yaitu *Melanesian Connection* (Sabir, 2018). Kedekatan etnis inilah yang menjadi salah satu sumber penyebab masifnya dukungan Vanuatu terhadap upaya kemerdekaan Papua (Sabir, 2018). Kepentingan Vanuatu dalam dukungan ini didasarkan pada dua hal, yaitu politik domestik dan orientasi kekuasaan (Sabir, 2018). Pada politik domestik, kebijakan-kebijakan luar negeri dari Vanuatu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kepentingan yang pro terhadap gerakan kemerdekaan Papua. Pengaruh dari politik domestik ini berkembang menjadi dua level, yaitu level nasional dan level internasional.

Pada level nasional, kelompok-kelompok ini menekan pemerintah Vanuatu untuk mewujudkan aspirasi mereka dalam sebuah kebijakan politik dan hal tersebut berhasil dilakukan (Thomas, 2016). Oleh karena itu, orientasi politik luar negeri Vanuatu berjalan selaras dengan tuntutan politik dalam negeri (Sabir, 2018).

Vanuatu juga memiliki kepentingan tersendiri untuk menjadi pemimpin regional dengan mengusung paham identitas *Melanesian Renaissance*, yaitu dimana seluruh kawasan Melanesia mendapat kemerdekaannya (Thomas, 2016). Paham ini mengangkat isu dekolonisasi bagi bangsa Melanesia yang belum merdeka sebagai bahan utama untuk menarik simpati internasional. Bergeraknya mekanisme politik domestik Vanuatu yang seperti itu merupakan hasil dari persinggungan prinsip sosialisme Melanesia yang merupakan gabungan dari beberapa prinsip seperti komunalisme, saling berbagi, dan kepedulian sesama. Nilai-nilai yang dibawa dari sosialisme Melanesia tersebut kemudian mencerminkan perubahan-perubahan revolusioner yang radikal pada bidang sosial, ekonomi, dan struktur politik secara cepat (Thomas, 2016).

Dukungan Vanuatu terhadap gerakan separatis di Papua, diaktualisasikan dalam berbagai forum internasional. Vanuatu gencar dalam menyuarakan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang bertujuan untuk menyudutkan Indonesia. Terdapat beberapa peristiwa yang menunjukkan sikap Vanuatu dalam menyudutkan Indonesia terkait isu separatis tersebut, diantaranya:

Tabel 1.1. Sidang Internasional Klaim Vanuatu Kepada Indonesia

No.	Sidang Internasional	Klaim Vanuatu atas Indonesia
1	Sidang Tahunan ke-68 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, 28 September 2013	Vanuatu menyatakan bahwa Indonesia bertanggung jawab atas ratusan ribu orang Papua yang disiksa dan dibunuh
2	Sidang Dewan HAM PBB ke-25 di Jenewa, Swiss, 4 Maret 2014	Vanuatu meminta PBB untuk mengirim utusan guna menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh Indonesia
3	Sidang Tahunan Majelis Umum PBB ke-71 di New York, Amerika Serikat, 27 September 2016	Vanuatu menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua dan menyerukan pembebasan bagi <i>West Papua</i> dalam menentukan nasib mereka sendiri
4	Sidang Dewan HAM PBB sesi ke-34 di Jenewa, Swiss, 3 Maret 2017	Vanuatu membacakan pidato atas nama tujuh negara kepulauan di Kawasan Pasifik yang berisi desakan kepada PBB untuk segera melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang telah dilakukan oleh Indonesia di Papua

Isu separatis di Papua juga dijadikan komoditas politik oleh elit-elit politik (*non-state actor*) di Vanuatu. Dalam beberapa kasus, isu separatis di Papua bahkan dimanfaatkan untuk

menyerang lawan politik (Thomas, 2016). Hal tersebut dimungkinkan dikarenakan isu separatis di Papua mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat Vanuatu, mulai dari elit hingga warga biasa, dari tingkat suku dan desa, hingga pemuka agama (Thomas, 2016). Salah satu mantan Perdana Menteri Vanuatu, Sato Kilman, bahkan mendapatkan mosi tidak percaya dari parlemen Vanuatu pada tahun 2013, karena dianggap terlalu dekat dengan Indonesia. Parlemen Vanuatu pada saat itu meyakini bahwa Indonesia bertanggung jawab atas berbagai dugaan pelanggaran HAM di Papua. Kasus pelanggaran HAM berat di Papua Barat yang diangkat oleh Vanuatu pada sidang tingkat tinggi dewan HAM PBB tersebut membuat Indonesia terlihat buruk di forum tersebut dan membuat Indonesia bersikap *defence* atas pernyataan yang dilontarkan oleh PM Vanuatu. Hal tersebut disebabkan oleh pernyataan Vanuatu yang selalu memojokkan Indonesia pada saat membahas kasus tersebut.

Indonesia pun mengeluarkan pernyataan bahwa Vanuatu telah menentang hubungan persahabatan antara Indonesia-Vanuatu yang telah terjalin lama dan terlalu mencampuri urusan internal Indonesia dengan memberikan dukungan kepada gerakan separatis yang terjadi di Papua untuk meraih kemerdekaannya. Wakil Presiden RI periode 2014-2019, Jusuf Kalla, menyatakan bahwa “Indonesia tidak akan membiarkan negara manapun untuk merusak keutuhan dari NKRI. Seperti negara berdaulat lainnya, Indonesia dengan tegas akan mempertahankan keutuhan dari NKRI (Davidson, 2018)”. Selain itu, perwakilan delegasi Indonesia, Rayyanul Sangadji, mengatakan bahwa Vanuatu lebih menunjukkan upayanya dalam mendukung separatisme yang terjadi di Papua daripada menunjukkan kepeduliannya terhadap Papua Barat. Akibat dari semakin vokalnya Vanuatu dalam mendukung upaya separatisme di Papua, Indonesia kemudian mulai melakukan pendekatan kepada Vanuatu dengan lebih intens, salah satunya melalui penyelenggaraan aktivitas dan kegiatan yang bertemakan Melanesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, penulis ingin melihat diplomasi publik yang telah dilakukan Indonesia terhadap Vanuatu demi menurunkan tendensi separatisme di Papua.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah yang didapatkan adalah **“Bagaimana diplomasi publik yang dilakukan Indonesia terhadap Vanuatu dalam Menurunkan Tendensi Separatisme di Papua?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara objektif:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya diplomasi publik yang dilakukan Indonesia terhadap Vanuatu dalam menurunkan tendensi separatisme di Papua

Tujuan Penelitian secara subjektif:

1. Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya
2. Memperluas pemahaman teori dan aplikasinya dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Penelitian Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan menggunakan penelitian sejenis atau pengembangan selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Penelitian Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terhadap mahasiswa, dosen, pengamat dan praktisi Ilmu Hubungan Internasional yang berminat pada diplomasi publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam menurunkan tendensi separatisme yang terjadi di Papua.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam meneliti dan menganalisis judul yang diangkat, penulis mengambil beberapa tinjauan pustaka yang dianggap relevan dengan objek yang diteliti. Tinjauan pustaka yang diambil dari berbagai jurnal penelitian terdahulu, diharapkan dapat membantu penulis guna memperdalam pemahaman mengenai isu dan permasalahan yang diteliti. Selain itu, tinjauan pustaka yang diambil dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menemukan landasan teoritis dan kerangka konsep yang relevan dengan objek yang diteliti. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk penelitian ini, diantaranya;

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1	Nama Penulis	Gia Noor Syah Putra, Tri Legionosuko, dan Adnan Madjid
	Judul	Strategi Pemerintah Indonesia terhadap Negara-negara Anggota <i>Melanesian Spearhead Group</i> (MSG) dalam Menghadapi Propaganda Organisasi Papua Merdeka (OPM): Studi Kasus Negara Republik Vanuatu
	Tahun	2019
	Hasil Penelitian	Jurnal ini membahas mengenai bagaimana strategi pemerintah

		Indonesia dalam menghadapi propaganda OPM terhadap negara-negara anggota MSG, yaitu dengan melakukan kontra propaganda atas propaganda yang dilakukan oleh OPM. Terdapat tiga langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu menguatkan pembinaan teritorial oleh TNI AD di Papua, meng- <i>counter</i> isu-isu yang dipropagandakan oleh OPM melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi, dan melalui jalur diplomasi. Meskipun demikian, strategi Pemerintah Indonesia masih belum berhasil dikarenakan Indonesia masih minim menggunakan aktor non-negara sebagai bagian dari garda terdepan dalam melakukan kontra-propaganda
	Perbandingan	Jurnal ini membahas mengenai beberapa strategi pemerintah Indonesia menggunakan aktor non-negara sebagai bagian dari <i>counter</i> isu-isu yang dipropagandakan oleh OPM. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis akan lebih fokus terhadap strategi diplomasi publik yang dilakukan Indonesia terkait isu separatisme di Papua
2	Nama Penulis	M. Syaprin dan Musfiroh
	Judul	<i>The Melanesian Spearhead Group in terms of Indonesia's interest</i>
	Tahun	2018

	Hasil Penelitian	Kebijakan Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan MSG, tidak terlepas dari aktivitas OPM di Papua yang mana berpotensi untuk mengganggu keamanan nasional dan stabilitas negara. Di lain pihak, keputusan Indonesia untuk menjadi anggota MSG juga tidak terlepas dari dukungan yang diberikan oleh negara-negara <i>Melanesian</i> terhadap OPM di Papua. Terkait dengan dukungan ini, keputusan terbaik yang dapat diambil oleh Indonesia adalah dengan melakukan pendekatan terhadap negara-negara tersebut. Keanggotaan dari MSG dapat mempermudah Indonesia untuk ambil bagian atau mempengaruhi berbagai kebijakan yang diisukan oleh MSG dengan menawarkan bantuan finansial kepada negara-negara anggota. Hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap citra negara Indonesia di wilayah bagian Pasifik Selatan
	Perbandingan	Perbedaan terletak pada objek penelitian. Pada jurnal ini, yang menjadi objek utama dari penelitian adalah negara Indonesia dan <i>Melanesian Spearhead Group</i> . Sedangkan, yang akan menjadi objek penelitian dari peneliti adalah negara Indonesia dan Vanuatu
3	Nama Penulis	Indriati Kusumawardhani dan Arie Afriansyah

	Judul	<i>Free Papua Organization: Belligerent, Combatant, or Separatist?</i>
	Tahun	2019
	Hasil Penelitian	<p>Berdasarkan kriteria yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Konvensi Jenewa 1977, Organisasi Papua Merdeka (OPM) bukanlah merupakan <i>Belligerent</i> (negara yang berperang) atau <i>Combatant</i> (Pejuang), melainkan sebuah kelompok separatisme. Pendapat dari OPM mengenai wilayah Papua yang mana bukanlah merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidaklah benar. Yang termasuk dalam wilayah Republik Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah keseluruhan wilayah yang pernah dikuasai oleh Pemerintah Kerajaan Belanda sebelum proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal tersebut tertuang dalam prinsip dari <i>Uti Possidetis Juris</i> – prinsip dari <i>Uti Possidetis Juris</i> merupakan sebuah prinsip untuk menentukan batas sebuah negara berdasarkan daerah jajahan sebelumnya</p>
	Perbandingan	<p>Perbedaan terletak pada fokus penelitian. Pada jurnal ini, yang menjadi fokus penelitian adalah status dari OPM (<i>Belligerent, Combatant, or Separatist</i>) dan penjelasan mengenai wilayah Papua</p>

		sebagai bagian dari NKRI. Sedangkan penulis tidak akan memiliki fokus penelitian terhadap OPM itu sendiri, melainkan negara Vanuatu yang menjadi salah satu negara paling vokal dalam menyuarakan gerakan separatis di Papua
4	Nama Penulis	Stephanie Lawson
	Judul	<i>West Papua, Indonesia and the Melanesian Spearhead Group: Competing Logics in Regional and International Politics</i>
	Tahun	2016
	Hasil Penelitian	Jurnal ini menjelaskan mengenai pengambilalihan Papua Barat oleh Indonesia dalam konteks dinamika dekolonisasi, awal pembangunan daerah, dan mengkaji kemunculan identitas Melanesia dan MSG. Selain itu, jurnal ini juga berfokus kepada penawaran yang dilakukan oleh orang-orang Papua Barat kepada MSG, aspek-aspek kunci dari peran Indonesia di subkawasan Melanesia, dan sejauh mana perkembangan isu ini dalam menyoroti logika persaingan dalam politik regional dan internasional
	Perbandingan	Jurnal ini menjelaskan mengenai awal mula dari pembentukan MSG, dimana hal tersebut dipicu oleh adanya kemunculan identitas Melanesia. Sedangkan penulis akan menjelaskan

		sejauh mana Vanuatu ikut andil dalam MSG tersebut
5	Nama Penulis	Ahmad Mina Ruhul Amin
	Judul	<i>The Enhancement of Cooperation Between Indonesia and Melanesian Spearhead Group Countries (2015-2017)</i>
	Tahun	2019
	Hasil Penelitian	Hubungan antara Indonesia dan negara-negara MSG mengalami perubahan-perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Hubungan di antara keduanya mencapai puncak pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut berbeda dengan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia pada masa lalu. Padahal pada saat itu Indonesia telah menjalin hubungan diplomatik dengan beberapa negara MSG, seperti Fiji dan Papua Nugini. Pada rezim orde baru, hubungan antara Indonesia dengan kawasan Pasifik umumnya berada pada titik terendah. Padahal secara geografis, Indonesia dan kawasan Melanesia bisa dikatakan berada di satu wilayah yang sama dan bertetangga. Namun hubungan di antara keduanya justru berbanding terbalik – seolah-olah merasa terasingkan oleh satu sama yang lain. Indonesia pada saat itu memandang negara-negara di kawasan

		<p>Pasifik Selatan sebagai negara kecil yang tidak diuntungkan secara ekonomi. Sehingga, daerah tersebut kurang mendapatkan perhatian dari Indonesia. Hal tersebut sama dengan pemahaman dari wilayah Melanesia yang memandang Indonesia sebagai negara yang bermusuhan dan menjadi ancaman bagi kehidupan etnis Melanesia – seperti kasus integrasi Timor-Timur pada tahun 1976. Namun, Indonesia telah melakukan beberapa tindakan yang dapat membuat hubungan antar negara dengan kawasan Pasifik Selatan agar menjadi lebih baik. Cara-cara yang ditempuh oleh Indonesia untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan kawasan Pasifik Selatan adalah dalam bentuk peningkatan kapasitas pembangunan, bantuan luar negeri dan bantuan kemanusiaan yang terus ditingkatkan.</p>
	Perbandingan	<p>Perbedaan penelitian terletak pada penggunaan teori yang digunakan. Pada tesis ini, teori yang digunakan adalah <i>collective identity</i>. Sedangkan penulis akan menggunakan teori diplomasi publik.</p>
6	Nama Penulis	Ahmad Sabir
	Judul	Diplomasi Publik Indonesia terhadap Vanuatu dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme di Papua

	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Variabel aktor pelaksana diplomasi publik Indonesia masih didominasi oleh aktor negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh aspek waktu atau <i>timeline</i> pelaksanaan diplomasi publik. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia tidak didukung oleh lembaga khusus yang secara fokus dan terkoordinasi menjalankan diplomasi publik. Selain itu, terdapatnya doktrin <i>Melanesian Renaissance</i> menghambat pelaksanaan diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia.
	Perbandingan	Perbedaan penelitian terletak pada indikator dan data-data yang dikumpulkan. Pada penelitian Ahmad Sabir, peneliti menggunakan indikator dari Leonard, Stead, dan Smewing. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator dari Joseph Nye. Sehingga, data-data yang dikumpulkan memiliki perbedaan, dikarenakan indikator yang digunakan oleh masing-masing peneliti tidaklah sama

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Diplomasi Publik

Diplomasi merupakan salah satu instrument penting dalam pelaksanaan kepentingan nasional suatu negara. Diplomasi sebagai alat utama dalam pencapaian kepentingan nasional yang berkaitan dengan negara lain atau organisasi internasional (Dictio, 2020). Melalui

diplomasi, sebuah negara dapat membangun citra tentang dirinya. Dalam hubungan antar negara, pada umumnya diplomasi dilakukan sejak tingkat paling awal sebuah negara hendak melakukan hubungan bilateral dengan negara lain hingga keduanya mengembangkan hubungan ke tingkat selanjutnya (Kemlu, 2020).

Diplomasi merupakan sebuah perilaku dari hubungan yang terjadi antar negara yang berdaulat melalui perantara perwakilan resmi negaranya yang berada di negaranya maupun yang ditugaskan di luar negeri, mereka yang menjadi perwakilan akan melaksanakan layanan diplomasi atau menjadi seorang diplomat (Berridge & James, 2001). Perwakilan resmi dipilih oleh negara itu sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain atau negara lain (Dictio, 2020). Diplomasi antar negara dapat mencakup seluruh proses hubungan luar negeri, baik dalam pembentukan kebijakan luar negeri dan terkait pelaksanaannya. Diplomasi dikatakan juga mencakup Teknik operasional untuk mencapai kepentingan nasional di luar batas wilayah yurisdiksi. Ketergantungan antar negara yang semakin tinggi kemudian menyebabkan semakin banyak jumlah pertemuan internasional dan konferensi internasional yang dilakukan sampai saat ini.

Seiring dengan berkembangnya situasi dunia, aktor, dan teknologi informasi, membuat arah diplomasi tradisional bergeser pada diplomasi yang lebih modern, dalam hal ini yaitu diplomasi publik (Hennida, 2020). Perkembangan teknologi informasi membuat pilihan-pilihan alat diplomasi menjadi beragam. Jika sebelumnya diplomasi banyak diwarnai isu-isu yang terkait dengan ‘perang’, kini isu tersebut semakin bergeser. Hal tersebut diakibatkan dari kemunculan isu-isu lain seperti lingkungan, pariwisata, terorisme, kesehatan, dan HAM menjadi sasaran dari diplomasi publik.

Terdapat berbagai variasi definisi diplomasi publik yang ditemukan saat ini. Edmund Gullion sendiri mendefinisikan diplomasi publik sebagai:

“Public diplomacy deals with the influence of public attitudes on the formation and execution of foreign policies. It encompasses dimensions of international relations beyond traditional diplomacy; the cultivation by government of public opinion in other countries; the interaction of private groups and interest in one country with those of another; the reporting of foreign affairs and its impact on policy; communication between those whose job is communication, as between diplomats and foreign correspondents; and the processes of inter-cultural communications (Rachmawati, 2019).”

Diplomasi publik dimaknai sebagai proses komunikasi pemerintah terhadap publik mancanegara yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atas negara, sikap, institusi, budaya, kepentingan nasional, dan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negaranya (Wang, 2006). Jay Wang (2006) melihat diplomasi publik sebagai suatu usaha untuk mempertinggi mutu komunikasi antar negara dengan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan dalam pelaksanaannya tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah (Hennida, 2020). Sementara itu, Jan Mellisen (2006) mendefinisikan diplomasi publik sebagai usaha untuk memengaruhi orang atau organisasi lain di luar negaranya dengan cara positif sehingga mengubah cara pandang orang tersebut terhadap suatu negara (Mellisen, 2006). Berdasarkan semua definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa diplomasi publik berfungsi untuk mempromosikan kepentingan nasional melalui pemahaman, penginformasian, dan memengaruhi publik di luar negeri. Oleh karena itu, diplomasi publik merupakan salah satu instrumen *soft power* (Nye, 2008).

Berbeda dengan diplomasi tradisional yang pelaksanaannya dijalankan oleh pemerintah ke pemerintah (*government to government*), sedangkan diplomasi publik lebih melibatkan publik suatu negara, dimana aktivitasnya berupa hubungan antara pemerintah ke masyarakat (*government to people*) ataupun masyarakat ke masyarakat (*people to people*). Hal tersebut dikarenakan fokus dalam pelaksanaan diplomasi publik merupakan keterlibatan dari publik itu sendiri, baik publik domestik, maupun publik mancanegara yang menjadi tujuan diplomasi. Terdapat tiga perbedaan antara diplomasi publik dengan diplomasi yang bersifat resmi (tradisional), yaitu (Mellisen, 2006):

1. Diplomasi publik bersifat transparan dan berjangkauan luas, sebaliknya diplomasi tradisional cenderung tertutup dan memiliki jangkauan terbatas
2. Diplomasi publik ditransmisikan dari pemerintah ke pemerintah lainnya
3. Tema dan isu yang diusung oleh diplomasi tradisional terdapat pada perilaku dan kebijakan pemerintah, sedangkan tema dan isu yang diangkat oleh diplomasi publik lebih ke arah sikap dan perilaku publik

Dalam diplomasi publik, perlu dipahami bahwa proses diplomasi tersebut tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga terjadi di dalam negeri. Permasalahan diplomasi publik tidak hanya tantangan terhadap kebijakan luar negeri, tetapi juga merupakan tantangan nasional (Potter, 2006). Esensi dari diplomasi publik adalah ‘membuat orang lain berada di pihak kita’, sedangkan permasalahan dalam diplomasi publik adalah bagaimana cara untuk mempengaruhi opini dan perilaku orang lain. Dalam hal ini, yang dimaksud orang bukan hanya pemangku kebijakan saja, tetapi juga khalayak umum atau publik.

Pelaksanaan diplomasi publik ditujukan untuk menarik perhatian publik dalam jangka waktu yang panjang dengan mekanisme pemberian informasi yang bersifat dua arah. Mark Leonard mengidentifikasi bahwa terdapat empat tujuan pelaksanaan diplomasi publik pada abad ke-21, yaitu (Bound, 2019):

1. Diplomasi publik bertujuan untuk memengaruhi sikap masyarakat dan meningkatkan dukungan masyarakat terhadap sebuah negara
2. Diplomasi publik bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan suatu negara yang dapat meliputi berbagai bidang seperti bidang pendidikan, pariwisata, dan budaya dari suatu negara
3. Pelaksanaan diplomasi publik juga ditujukan untuk meningkatkan apresiasi, menciptakan pandangan atau persepsi positif karena melalui diplomasi publik,

masyarakat asing dikondisikan untuk melihat dari sudut pandang negara pelaksana diplomasi publik

4. Diplomasi publik bertujuan untuk meningkatkan keakraban dan merubah citra suatu negara pada publik asing

Sebagai upaya untuk menciptakan citra yang baik di mata dunia internasional, diplomasi publik menurut Joseph Nye terdiri dari tiga dimensi penting, yaitu (Nye, 2008):

1. *Daily Communication*; meliputi penjelasan mengenai konteks keputusan dalam kebijakan domestik dan luar negeri. Setelah membuat keputusan, dalam demokrasi modern biasanya pemerintah secara resmi berfokus untuk memberikan informasi pada media. Fokus utama umumnya merupakan kepada media domestik/lokal. Sedangkan untuk media luar negeri/internasional harus menjadi target penting sebagai langkah awal dalam diplomasi publik. Langkah awal ini juga meliputi persiapan dalam menghadapi kondisi krisis, dimana ketika terjadi penyebaran informasi yang salah atau informasi yang menyesatkan dapat ditanggapi dengan segera
2. *Strategic Communication*; dimana upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan membentuk serangkaian tema sederhana yang diwujudkan dalam tindakan seperti halnya kampanye politik atau iklan. Kampanye tersebut dirancang demi mempertahankan komunikasi yang telah dibangun oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat tema utama dan mencapai keberhasilan kepentingan atau kebijakan yang telah dirancang. Tema-tema khusus akan difokuskan pada inisiatif kebijakan tertentu
3. *Development of Lasting Relationship*; berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk membangun hubungan jangka panjang yang bertahan lama dengan negara yang

menjadi target aktivitas diplomasi publik. Pada tahap ini, individu menjadi salah satu sasaran atau target dari aktivitas diplomasi, seperti halnya beasiswa, program pertukaran, program pelatihan, seminar, konferensi, dan akses terhadap saluran media

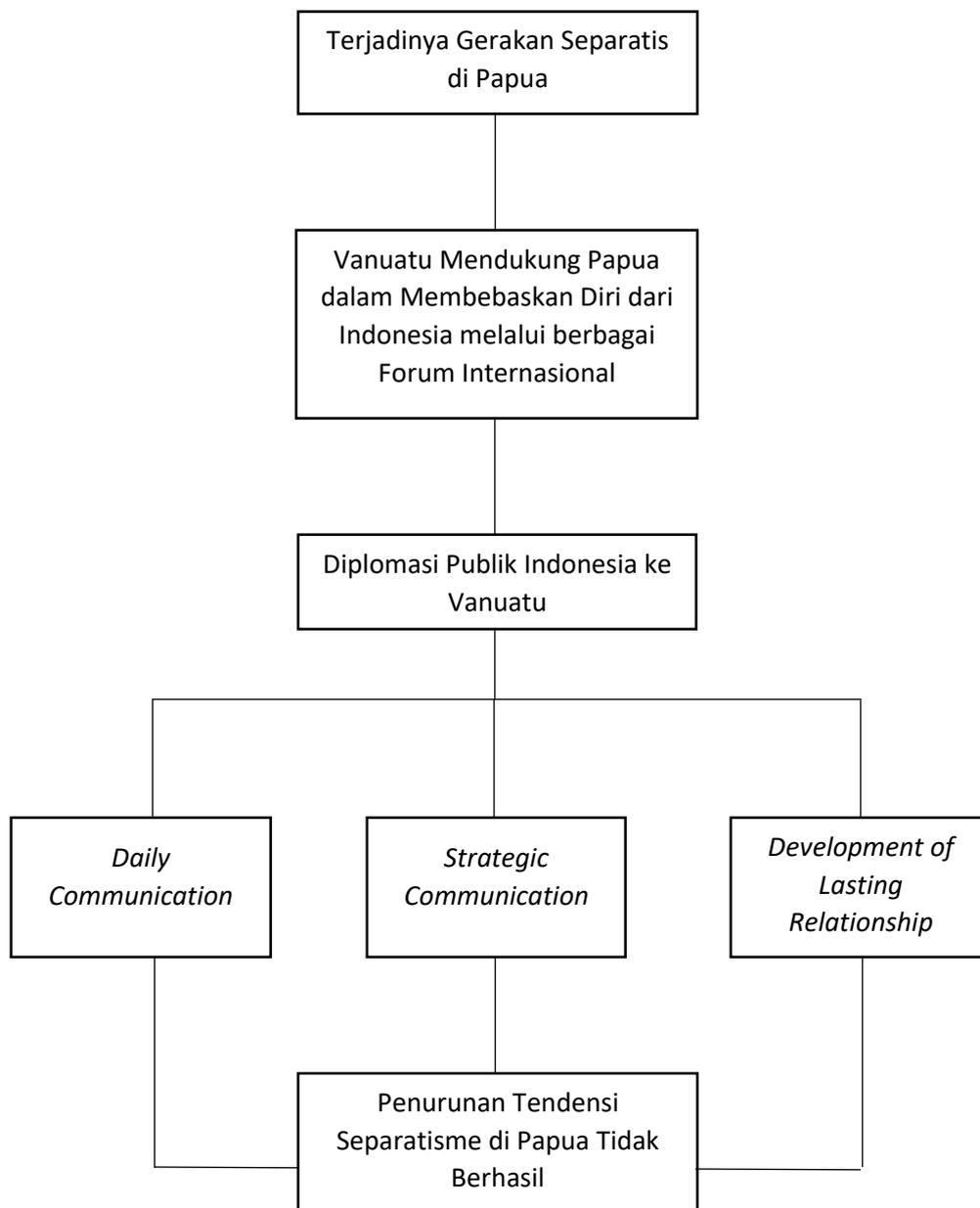
Sebagai instrumen *soft power*, perkembangan diplomasi publik bisa dikatakan tergolong pesat. Pesatnya perkembangan ini dipicu oleh kenyataan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi tradisional dianggap telah gagal dalam mengatasi konflik-konflik antarnegara. Akibat dari kegagalan diplomasi tradisional, telah berembang pemikiran untuk meningkatkan diplomasi publik sebagai cara alternatif dalam menyelesaikan konflik-konflik antarnegara (McDonald, 1991). Hal ini terjadi karena diplomasi publik memiliki ciri sebagai kelompok bukan pemerintah, bentuknya yang informal dinilai efektif dalam menurunkan tensi ketegangan, menghilangkan rasa takut, dan meningkatkan sifat saling ketergantungan di antara para pihak (Djelantik, 2004).

Meskipun diplomasi tradisional telah gagal, diplomasi publik lantas tidak menggantikan diplomasi tradisional, tetapi melengkapi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam diplomasi tradisional. Idealnya, diplomasi publik harus membuka jalan terhadap negosiasi yang dilakukan antarpemerintah, memberikan masukan informasi-informasi penting, dan memberikan cara pandang yang berbeda terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi. Untuk itu, diperlukan kerjasama aktor negara dan aktor non-negara yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tawar pemerintah. Aktor non-negara ini misalnya dapat berinteraksi dengan rekanan mereka dalam memengaruhi, memberikan masukan, dan menerapkan kebijakan luar negeri.

Penerapan diplomasi publik tidak terlepas dari komunikasi kebijakan luar negeri terhadap publik internasional. Ciri utama diplomasi publik adalah melibatkan semua

stakeholder dalam prosesnya. *Stakeholder* yang dimaksud disini tidak hanya sebatas Departemen Luar Negeri saja, tetapi juga lintas departemen dalam pemerintah, swasta, NGO, media, dan individu. Dengan porsi keterlibatan yang beragam dan besar tersebut, maka rancangan strategi komunikasi harus didepankan.

1.6.2. Alur Pemikiran



1.7. Argumen Utama

Merujuk kepada alur pemikiran, argumen utama penulis melihat bahwa diplomasi publik yang dilakukan oleh Indonesia sebagai upaya dalam menciptakan citra yang baik di mata dunia internasional – terutama Vanuatu – melalui serangkaian kegiatan seperti *Daily Communication*, yaitu melalui berbagai publikasi di beberapa media milik pemerintah dan swasta. *Strategic Communication*, dengan membentuk serangkaian tema sederhana yang diwujudkan dalam tindakan seperti halnya kampanye politik, iklan, serangkaian aktivitas, atau kegiatan yang didesain sedemikian rupa guna mempengaruhi persepsi publik. Terakhir melalui *Development of Lasting Relationship*, merupakan upaya dalam membangun hubungan jangka panjang yang bertahan lama dengan negara yang menjadi target aktivitas diplomasi publik dengan memanfaatkan beberapa instrumen kerjasama seperti; ekonomi, teknologi, pelatihan, beasiswa, pembangunan, pertanian, peternakan, dan lain-lain.

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan antar dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi (Nazir, 1988).

1.8.2. Definisi Konsep

Definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan penulis dalam mengoperasikan konsep tersebut (Singarimbun, Masri, & Effendi, 1989). Berikut adalah beberapa definisi konsep yang terdapat dalam penelitian:

- a. Separatisme; ditujukan pada tindakan seseorang/sekelompok orang/komunitas yang berada dalam kesatuan besar yang hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar tersebut dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa yang merdeka (Sefriani, 2003).
- b. Tendensi: merupakan satu set atau satu disposisi untuk bertingkah laku dengan cara tertentu atau sikap keberpihakan atau kecenderungan terhadap objek permasalahan tertentu.

1.8.3. Fokus dan Jangkauan Penelitian

a. Fokus Penelitian

Tabel 1.3. Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Diplomasi Publik Indonesia ke Vanuatu dalam Penurunan Tendensi Separatisme di Papua	Diplomasi Publik Indonesia ke Vanuatu	<i>Daily Communication</i>	Konteks keputusan dalam kebijakan domestik dan luar negeri yang berfokus dalam memberikan informasi kepada media

		<i>Strategic Communication</i>	Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk serangkaian tema sederhana yang diwujudkan dalam tindakan
		<i>Development of Lasting Relationship</i>	Aktivitas diplomasi publik dengan memanfaatkan beberapa instrumen kerjasama seperti; ekonomi, teknologi, pelatihan, beasiswa, pembangunan, pertanian, peternakan, dan lain-lain

b. Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi penelitian diplomasi publik Indonesia ke Vanuatu dalam penurunan tendensi separatisme di Papua pada tahun 2020, dikarenakan pada tahun tersebut adalah terakhir kalinya Indonesia melakukan diplomasi publik ke Vanuatu.

1.8.4. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi publik ke Vanuatu. Penetapan unit analisis ini dikarenakan penulis akan meneliti dan mengidentifikasi diplomasi publik yang dilakukan Indonesia ke Vanuatu dalam menurunkan tendensi separatisme di Papua.

1.8.5. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, skema, dan gambar (Sugiyono, 2015). Hal tersebut membuatnya berbeda dengan metode penelitian kuantitatif yang berfokus pada analisis data berupa angka (Harrison, 2001).

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui buku, artikel, jurnal, *annual report*, media tertulis, literatur, *website* dan dokumen resmi (Harnovinsah, 2020). Penulis mengambil beberapa sumber data yang selaras dengan objek yang diteliti, yaitu mengenai diplomasi publik Indonesia ke Vanuatu terkait isu separatisme di Papua.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang didapatkan melalui buku, artikel, jurnal, *annual report*, media tertulis, literatur, *website* dan dokumen resmi dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.8.7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan data dengan cara memanfaatkan penggunaan sumber data atau informasi yang berbeda untuk pemeriksaan atau pembandingan dari data tersebut. Penelitian ini menggunakan tiga triangulasi data, yaitu:

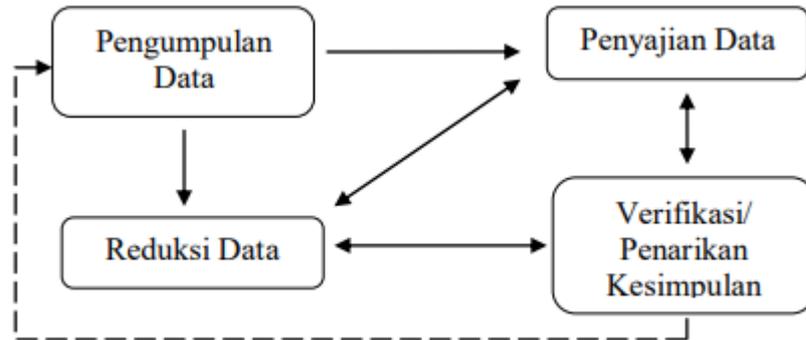
- a. Triangulasi sumber: merupakan teknik pemeriksaan kebenaran informasi tertentu atau pengujian kredibilitas data yang telah diperoleh dari berbagai sumber.
- b. Triangulasi metode: merupakan teknik dalam membandingkan informasi atau data penelitian. Triangulasi ini melakukan pemeriksaan melalui beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data dengan metode yang sama.
- c. Triangulasi teknik: merupakan pengumpulan data dengan menggunakan teknik yang berbeda pada data dari sumber yang sama.

1.8.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu analisis data kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, Terdapat tiga tahap dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi yang digambarkan sebagai berikut (Miles & Huberman, 1992):

Gambar 1.1.

Teknik Analisis Data Kualitatif



- a. Reduksi data dapat berbentuk rangkuman dengan memilih hal-hal penting dan memilih data yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Pada tahap ini, penulis akan memusatkan perhatian pada data yang telah ada kemudian data tersebut akan dipilih dan dicocokkan dengan penelitian yang diambil. Selanjutnya, data yang cocok akan disederhanakan dengan maksud mengklasifikasikan data atas dasar tema-tema tertentu. Data yang tersebar akan dipadukan dan penulis akan menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian penulis akan melakukan abstraksi data menjadi sebuah uraian singkat (Miles & Huberman, 1992).
- b. Penyajian data merupakan kegiatan ketika sekumpulan informasi yang telah dikumpul kemudian disusun, sehingga dapat diperoleh kemungkinan untuk melakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan langkah dan tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Penyajian data dalam penelitian ini terdiri dari teks naratif, tabel, dan bagan yang disusun secara sistematis sehingga nantinya akan mudah untuk dipahami (Miles & Huberman, 1992).

- c. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penyimpulan data-data didapatkan sesuai dengan kerangka teori yang dipakai. Kesimpulan yang didapatkan akan dijadikan intisari dari hasil eksperimen dan pernyataan mengenai hubungan data-data penelitian dengan hipotesis – termasuk alasan-alasan yang menyebabkan data-data penelitian berbeda dengan hipotesis (Miles & Huberman, 1992).

DAFTAR PUSTAKA

- ABC, N. (2014, Januari 16). <http://www.abc.net.au/news/>. Retrieved from abc.net.au:
<http://www.abc.net.au/news/2014-01-16/an-vanuatu-defends-msg-papua-visit-boycott/5203678>
- Aditjondro, G. J. (2000). *Cahaya Bintang Kejora; Papua dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi dan HAM*. Jakarta: Elsham.
- Al-Rahab, A. (2010). *Heboh Papua; Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Ansaka, K., & Bektianti, B. (1999). *Bintang Kejora di Papua*. Jakarta: Tempo.
- BBC. (2012, Juni 12). <http://www.bbc.co.uk/indonesia/>. Retrieved from bbc.co.uk:
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/06/120615_update_kerusuhan_papua.html
- Bekarekar, W. W. (2016). *Alasan Indonesia Dalam Melakukan Kerja Sama Dengan Melanesian Spearhead Group (MSG)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Berridge, G. R., & James, A. (2001). *A Dictionary Of Diplomacy*. New York: Palgrave.
- Bhakti, I. N. (1985). *Intervensi Amerika Serikat dalam Penyelesaian Masalah Irian Barat*. Jakarta: LRKN-LIPI.
- Bound, K. (2019). Cultural Diplomacy. In S. Trisni, P. E. Nasir, & A. Halim, *Diplomasi Sebuah Pengenalan Awal* (p. 166). Malang: IRDH.
- Budiardjo, C., & Liong, S. L. (1988). *West Papua: The Obliteration of a People*. London.
- Calwell, M., & Utrecht, E. (1979). *Indonesia, an Alternative History*. Sydney: Alternative Publishing Co-operative Ltd.
- Dariyanto, E. (2016, September 29). news.detik.com/berita. Retrieved from Detiknews:
<https://news.detik.com/berita/d-3309674/ini-pernyataan-keras-ri-yang-dibacakan-nara-rakhmatia-di-sidang-pbb>

- Davidson, H. (2018, Oktober 2). *theguardian.com/world/*. Retrieved from The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2018/oct/03/indonesia-accuses-vanuatu-of-inexcusable-support-for-west-papua>
- Dictio. (2020, Juni 6). *Dictio*. Retrieved from dictio.id: <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-diplomasi/123942/6>
- Didit Susiyanto, S. M. (2016, Februari 4). *Wordpress*. Retrieved from Wordpress.com: <https://trimongalah.wordpress.com/2016/02/04/pembangunan-dan-pendekatan-budaya-sebagai-basis-diplomasi-masalah-papua/>
- Ditlanstra. (2006). *Ketahanan Wilayah Papua*. Jakarta: Ditjen Strahan.
- Djelantik, S. (2004). Diplomasi Publik. *Analisis CSIS*, 352-365.
- Djopari, R. (1991). *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik di Irian Jaya dari Tahun 1964-1984*. Jakarta: Tesis Universitas Indonesia.
- Dorney, S. (2013, April 12). *ABC News*. Retrieved from abc.net.au: www.abc.net.au/news/2013-04-12/vanuatu-pm-to-terminate-indonesia-agreement/4626410
- Drooglever, P. J. (2010). *Act of Free Choice: Decolonisation and the Right to Self-Determination in West Papua*. Chicago: Oneworld Publication.
- Franciscaninternational. (2011, April 25). <http://franciscansinternational.org/>. Retrieved from franciscansinternational.org: http://franciscansinternational.org/old/fileadmin/docs/West_Papua_Report_2010-11/HAM_di_Papua_2010-2011_web.pdf
- Halim, A. (2018). Separatisme papua adalah musuh. *Journal of West Pasific*, 201-220.
- Harnovinsah. (2020, Agustus 31). <https://mercubuana.ac.id/files>. Retrieved from <https://mercubuana.ac.id>: <https://mercubuana.ac.id/files/MetodeLogiPenelitian/Met%20Pen%20UMB%203-ok.pdf>
- Harrison, L. (2001). *Politixal Research: An Introduction*. London: Routledge.

- Hennida, C. (2020). *Diplomasi Publik dalam Politik Luar Negeri. Departemen Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya*, 10.
- Hidayat, A. (2017, Februari 3). *Statiskian*. Retrieved from [statiskian.com](https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html#Penjelasan_dan_Pengertian_Metode_Penelitian):
https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html#Penjelasan_dan_Pengertian_Metode_Penelitian
- Isnaeni, H. F. (2020, September 30). *Historia*. Retrieved from [historia.id](https://historia.id/politik/articles/hubungan-diplomatik-indonesia-dan-vanuatu-DWjVN/page/1):
<https://historia.id/politik/articles/hubungan-diplomatik-indonesia-dan-vanuatu-DWjVN/page/1>
- Iswardhani, D. (2003). *Isu SALW (Smal Arms and Light Weapons) sebagai Isu Keamanan Nasional: Studi Kasus Indonesia*. Jakarta: FISIP UI.
- KBBI. (2021, Februari 15). <https://jagokata.com/arti-kata>. Retrieved from jagokata.com:
[https://jagokata.com/arti-kata/tendensi.html#:~:text=%5Btendensi%5D%20Makna%20tendensi%20di%20KBBI,kecondongan%20\(pada%20suatu%20hal\)](https://jagokata.com/arti-kata/tendensi.html#:~:text=%5Btendensi%5D%20Makna%20tendensi%20di%20KBBI,kecondongan%20(pada%20suatu%20hal)).
- Kemdikbud. (2015, Oktober 30). kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali. Retrieved from Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan:
<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbbali/festival-budaya-melania-2015/>
- Kemenlu. (1995). *Joint Communique Concerning the Establishment of Diplomatic Relations Between the Republic of Indonesia and the Republic of Vanuatu*. Jakarta: Kementerian Luar Negeri Indonesia.
- Kemlu. (2020, Juni 1). *Kemlu RI*. Retrieved from kemlu.go.id:
https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/hubungan_bilateral/2328/etc-menu
- King, G. (1994). *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kompas. (2010, Maret 23). <http://kompas.com/utama/>. Retrieved from [Kompas.com](http://kompas.com):
<http://kompas.com/utama/news/0603/24/183213.htm>
- Kontras. (2016, Desember 13). <http://www.kontras.org/baru/>. Retrieved from [kontras.org](http://www.kontras.org):
<http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf>

- Leith, D. (2003). *The Politics of Power: Freeport in Suharto's Indonesia*. Hawai: University of Hawai Press.
- Leonard, M., Stead, C., & Smewing, C. (2002). *Public Diplomacy*. London: The Foreign Policy Centre.
- Mataram, H. (1994). *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. Solo: UNS Press.
- McDonald, J. (1991). Further Exploration of Track Two Diplomacy. In L. Kreisberg, & S. J. Thorson, *Timing the De-Escalation of International Conflict* (pp. 220-221). Syracuse: University Press.
- McHenry. (2009). Does Globalization Cause Separatism? A Critical Examination of the Globalization-Separatism Relationship. *The 21st World Congress of the International Political Science Association*. Santiago: International Political Science Association.
- Mellisen, J. (2006). Public Diplomacy Between Theory and Practice. In J. Noya, *The Present and Future of Public Diplomacy: A European Perspective* (p. 43). California: Rand Corporation.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Jakarta: UI-Press.
- Munandar, Y. (2014). *Menemukan Arah Kerja Sama Ekonomi Indonesia dengan Negara Mitra: Malaysia, Singapura, Bosnia Herzegovina, Moldova, dan Solomon Islands*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nainggolan, P. P. (2008). Masalah Perbatasan Indonesia - Papua New Guinea; Perspektif Keamanan. *Kajian*, Vol. 13 No. 4, 612.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Retrieved from liguistikkid.com.
- News, A. (2014, Maret 5). *ABC News*. Retrieved from [abcnews.net.au: http://www.abc.net.au/news/2014-03-05/vanautu-urges-human-rights-investigation/5301270](http://www.abc.net.au/news/2014-03-05/vanautu-urges-human-rights-investigation/5301270)

- Nugroho, B. P. (2017, Oktober 10). *news.detik.com/berita*. Retrieved from detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-3677601/isu-separatisme-papua-di-pbb-dan-bantahan-dari-diplomat-muda-ri>
- Nye, J. (2008). *Public Diplomacy and Soft Power*. Washington DC: Sage Publications Inc.
- Papua, F. W. (2014, Maret 4). <http://freewestpapua.org/2014/03/04/>. Retrieved from freewestpapua.org: <http://freewestpapua.org/2014/03/04/vanuatu>
- Papua, M. (2002). *Seri Pendidikan Politik Papua*. Jayapura: Sekretariat Presidium Dewan Papua dan Biro Penelitian STFT Fajar Timur.
- Partiana, W. (1990). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Permanasari, A. (1999). *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: ICRC.
- Pertahanan, D. A. (2016, November 7). http://oppb.webs.com/Studi_Ketahanan_Wilayah_Papua.pdf. Retrieved from oppb.web.com: http://oppb.webs.com/Studi_Ketahanan_Wilayah_Papua.pdf
- Pomerance, M. (1982). *Self Determination in Law and Practice: the New Doctrine in the United Nations*. London: Martinus Nijhoff Publisher.
- Potter, E. (2006). *Branding Canada: Projecting Canada's Soft Power through Public Diplomacy*. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Puspitasari, I. (2010). Indonesia's New Foreign Policy - 'Thousand Friends - Zero Enemy'. *IDS Issue Brief*, 3.
- Putnam, D. R. (1988). *Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two-Level Games*. Chicago: Summer.
- Putra, G. N., Legionosuko, T., & Madjid, A. (2019). Strategi Pemerintah Indonesia Terhadap Negara-Negara Anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) Dalam Menghadapi Propaganda Organisasi Papua Merdeka (OPM): Studi Kasus Negara Republik Vanuatu. *Jurnal Peperangan Asimetris*, 31-44.
- Rachmawati, I. (2019). Diplomasi Publik Meretas Jala Harmoni dalam Hubungan Antar Negara. In S. Trisni, P. E. Nasir, & A. Halim, *Diplomasi Sebuah Pengenalan Awal* (p. 165). Malang: IRDH.

- Rahab, A. A. (2010). *Heboh Papua: Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme*. Jayapura: Komunitas Bambu.
- Rahman, M. A. (2017, Maret 2). *Kompas*. Retrieved from internasional.kompas.com: <http://internasional.kompas.com/read/2017/03/02/21030521/politisasi.isu.ham.di.papua.vanu-atu.didesak.fokus.masalah.ham.sendiri>
- Rappler. (2016, Oktober 2). *Rappler*. Retrieved from rappler.com: <https://www.rappler.com/indonesia/147970-pelanggaran-ham-papua-sidang-umum-pbb>
- Review, P. (2012). Lima Masalah Mendasar di Papua. *Papua Review*, 8.
- Ricklefs, M. (1981). *A History of Modern Indonesia*. London: Macmillan Education Ltd.
- Sabir, A. (2018). Diplomasi Publik Indonesia Terhadap Vanuatu Dalam Upaya Membendung Gerakan Separatisme Papua. *Jurnal Hubungan Internasional Universitas Indonesia*, 92.
- Sefriani. (2003). Separatisme Dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka. *UNISIA No.47/XXVI/I/2003*, 41-53.
- Sendari, A. A. (2019, Agustus 8). *Liputan6*. Retrieved from hot.liputan6.com: <https://hot.liputan6.com/read/4032771/mengenal-jenis-penelitian-deskriptif-kualitatif-pada-sebuah-tulisan-ilmiah#:~:text=Pengertian%20penelitian%20deskriptif&text=Penelitian%20deskriptif%20adalah%20salah%20satu,suatu%20fenomena%20atau%20kenyataan%20sosial>
- Singarimbun, Masri, & Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Starbuck, R. (2001). Liputan Pers Indonesia Tentang Gerakan Separatisme. *Universitas Muhammadiyah Malang*, 1-54.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Suraputra, S. (1982, Juli). Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional Publik. *Hukum dan Pembangunan*, pp. 299-300.
- Sureda, A. R. (1973). *The Evolution of the Right to Self Determination Right: a Study of United Nations Practice*. Leiden: Sijthoff.
- Suriadiredja, K. (1985). *Tantangan dan Perjuangan di Bumi Cendrawasih*. Jakarta: Agape Press.
- Syamsudin, N. (1989). *Integrasi Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Tabloidjubi. (2014, Maret 16). <http://tabloidjubi.com/16/2014/03/05/>. Retrieved from tabloidjubi.com: <http://tabloidjubi.com/16/2014/03/05/pidato-pm-vanuatu-di-hadapan-sidang-ham-pbb-25-10-persen-populasi-papua-telah-dibunuh-oleh-tentara-indonesia/>
- Tasrif, S. (1990). *Hukum Internasional Tentang Pengakuan dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Abardin.
- Tebay, N. (2016). *Pertarungan Indonesia Versus Papua*. Tempo.
- Thomas, B. T. (2016). Kepentingan Vanuatu Dalam Usaha Pemerdekaan Papua. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, 572-583.
- ULMWP. (2020, Desember 9). *ULMWP*. Retrieved from ULMWP.org: <https://www.ulmwp.org/ulmwp>
- UNGA. (1969). *Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda mengenai West New Guinea (Irian Barat)*. Jakarta: UNGA Resolution 2504 (XXIV).
- Utomo, A. H. (2020, September 28). *Kompasiana*. Retrieved from Kompasiana.com: <https://www.kompasiana.com/arisheruutomo/5f712e91097f36254d605992/indonesia-vanuatu-bukan-representasi-papua>
- Vermonte, P. J. (2003). *Problematika Peredaran Small Arms di Kawasan Asia Tenggara; Thailand, Filipina dan Indonesia*. Jakarta: Analisis CSIS Tahun XXXII/203 No. 1.
- Vira, P. G. (1971). *Dinas Sejarah Militer Kodam XVII Cendrawasih*. Jayapura.
- Visscher, C. d. (1985). *Theory and Reality in Public International Law*. Princeton: Princeton University.

- Wahyono. (2019, Desember 2). *Sindo News*. Retrieved from Sindonews.com:
<https://nasional.sindonews.com/berita/1463855/14/sejumlah-gerakan-separatis-di-indonesia>
- Wang, J. (2006). Public Diplomacy and Global Business. *The Journal of Business Strategy*, 49-58.
- Williams, K. (2001, Mei 11). <http://www.asiet.org.au/>. Retrieved from asiet.org:
<http://www.asiet.org.au/>